

## ANALISIS PASAR TENAGA KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mikael Silaban<sup>1</sup>, Riski Anto Nainggolan<sup>2</sup>, Sri Ningsih<sup>3</sup>

Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi <sup>1,2,3</sup>

Email: [Kaelsilaban05@gmail.com](mailto:Kaelsilaban05@gmail.com)<sup>1</sup>, [riskinainggolan0510@gmail.com](mailto:riskinainggolan0510@gmail.com)<sup>2</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>This study aims to analyze the dynamics of the labor market and the Open Unemployment Rate (OUR) in West Nusa Tenggara (NTB) Province during the 2020–2024 period and its projection toward 2026. This research employs a qualitative descriptive method using a secondary data analysis approach derived from Statistics Indonesia (BPS) and relevant literature. The findings indicate that the OUR in NTB has consistently declined from 4.22% in 2020 to 2.73% in 2024, remaining below the national average. However, the low unemployment rate does not fully reflect labor welfare, as it is still dominated by the informal sector, high underemployment, and skill mismatches with industry demands. Therefore, strengthening vocational education, improving human resource quality, and formalizing MSMEs are essential to promote inclusive and sustainable economic growth in the region.</i></p> <p><b>Keyword:</b> Labor Market, Open Unemployment Rate, West Nusa Tenggara, Inclusive Growth, Informal Sector.</p>
Nomor : 4	
Bulan : April	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pasar tenaga kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2020–2024 serta proyeksinya hingga 2026. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPT NTB mengalami penurunan yang konsisten dari 4,22% pada tahun 2020 menjadi 2,73% pada tahun 2024, berada di bawah rata-rata nasional. Namun, rendahnya tingkat pengangguran tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan tenaga kerja karena masih didominasi oleh sektor informal, tingginya setengah pengangguran, serta ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan formalisasi UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di NTB.

**Kata Kunci:** Pasar Tenaga Kerja, Pengangguran Terbuka, NTB, Pertumbuhan Inklusif, Sektor Informal.

### A. PENDAHULUAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetap menjadi indikator krusial dalam mengukur kesehatan ekonomi makro Indonesia selama satu dekade terakhir. Secara nasional, struktur pasar tenaga kerja Indonesia mengalami transformasi signifikan, di mana sektor jasa mulai menggeser dominasi sektor pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), meskipun

ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi pasca-pandemi, tantangan pengangguran terdidik dan penyerapan tenaga kerja di sektor formal masih menjadi isu utama yang menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh kepulauan.

Pentingnya analisis pengangguran di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), didasari oleh adanya disparitas spasial yang nyata dalam distribusi lapangan kerja. Analisis lokal menjadi vital karena kebijakan nasional seringkali tidak mampu menyentuh akar permasalahan yang bersifat spesifik wilayah. Sebagaimana ditegaskan oleh Arsyad (2018), pembangunan daerah yang efektif memerlukan pemetaan akurat terhadap karakteristik angkatan kerja lokal guna menghindari ketidakseimbangan antara suplai tenaga kerja dengan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki daerah tersebut.

Meninjau tren 10 tahun terakhir (2014–2024), TPT di Provinsi NTB menunjukkan fluktuasi yang dinamis namun cenderung kompetitif di bawah rata-rata nasional. Pada periode 2014–2019, TPT NTB berada di kisaran 3% hingga 4%, namun mengalami lonjakan signifikan saat pandemi COVID-19 menghantam sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung daerah. Firmansyah dkk. (2022) mencatat bahwa meskipun angka pengangguran di NTB sempat menyentuh titik terendah secara historis, kualitas pekerjaan yang tersedia masih didominasi oleh sektor informal dengan produktivitas yang rendah.

Interpretasi data TPT di NTB mencerminkan fenomena "pengangguran rendah namun kemiskinan tinggi," yang menunjukkan bahwa penduduk cenderung bekerja apa saja (sektor informal) demi bertahan hidup. Data menunjukkan bahwa penurunan angka pengangguran tidak selalu linear dengan peningkatan kesejahteraan jika tidak dibarengi dengan upah yang layak. Mulyadi (2019) berpendapat bahwa rendahnya TPT di wilayah agraris seperti NTB seringkali menutupi masalah *underemployment* atau setengah pengangguran, di mana pekerja bekerja dengan jam kerja yang tidak optimal.

Kondisi ekonomi NTB yang sangat bergantung pada sektor pertambangan dan pariwisata menyebabkan pasar tenaga kerja menjadi sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Tren TPT sangat dipengaruhi oleh harga komoditas global dan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke destinasi seperti Mandalika. Menurut Suryahadi dkk. (2021), ketergantungan pada sektor padat modal seperti pertambangan seringkali menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara angka, namun rendah dalam penyerapan tenaga kerja lokal (*jobless growth*), sehingga diperlukan diversifikasi ekonomi ke sektor padat karya.

Sebagai langkah strategis, rekomendasi kebijakan harus difokuskan pada penguatan *link and match* antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri pariwisata dan hilirisasi

pertambahan di NTB. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperluas akses pemodalannya bagi UMKM untuk memperkuat sektor informal menjadi lebih formal dan berdaya saing. Sebagaimana disarankan oleh Todaro dan Smith (2020), intervensi pemerintah dalam pasar tenaga kerja harus mencakup penyediaan informasi pasar kerja yang transparan serta perlindungan sosial bagi pekerja rentan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah dalam jangka panjang.

## **Tinjauan Teori**

### **1. Konsep Pengangguran Terbuka**

Pengangguran terbuka merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Secara konseptual, pengangguran terbuka merujuk pada situasi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, sedang aktif mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha baru, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Menurut Mulyadi (2019), pengangguran terbuka mencerminkan kapasitas ekonomi yang belum mampu menyerap sumber daya manusia secara penuh, sehingga potensi produktivitas individu tersebut terbuang secara percuma.

### **2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator persentase yang digunakan untuk mengukur sejauh mana angkatan kerja di suatu wilayah tidak terserap oleh pasar kerja. Kalkulasi TPT dilakukan dengan membagi jumlah penganggur terbuka dengan jumlah total angkatan kerja (penduduk bekerja ditambah penganggur). Badan Pusat Statistik (2023) menekankan bahwa TPT merupakan indikator kunci untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ketenagakerjaan; semakin tinggi angka TPT, maka semakin rendah tingkat penyerapan tenaga kerja yang terjadi di daerah tersebut, yang pada gilirannya dapat memicu masalah sosial-ekonomi.

### **3. Pengangguran Friksional**

Jenis pengangguran ini bersifat sementara dan terjadi karena adanya waktu tunggu atau "gesekan" saat seseorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau bagi lulusan baru yang sedang mencari kerja pertama mereka. Mankiw (2021) menjelaskan bahwa pengangguran friksional sering kali tidak terelakkan karena informasi yang tidak sempurna di pasar kerja dan adanya proses pencarian kerja (*job search*) yang memerlukan waktu untuk mempertemukan keahlian pekerja dengan kebutuhan spesifik pemberi kerja.

### **4. Pengangguran Struktural**

Pengangguran struktural merupakan bentuk pengangguran yang lebih persisten dan sulit diatasi karena berakar pada ketidaksesuaian (*mismatch*) mendasar dalam ekonomi. Hal ini terjadi ketika terdapat perubahan dalam struktur ekonomi (misalnya dari agraris ke industri atau digital) yang menyebabkan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar. Menurut Sukirno (2020), pengangguran struktural sering kali disebabkan oleh kemajuan teknologi atau pergeseran permintaan konsumen yang memaksa tenaga kerja untuk melakukan pelatihan ulang (*retraining*) agar dapat kembali terserap dalam lapangan kerja baru.

### **5. Pengangguran Siklikal (Konjungtur)**

Pengangguran jenis ini muncul ketika perekonomian mengalami resesi atau penurunan agregat permintaan, yang menyebabkan perusahaan mengurangi kapasitas produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Todaro dan Smith (2020) menyatakan bahwa pengangguran siklikal bersifat sensitif terhadap kondisi moneter dan fiskal; dalam konteks daerah seperti NTB, pengangguran ini sering terlihat saat sektor utama seperti pariwisata mengalami kelesuan akibat krisis global atau bencana.

### **6. Pengangguran Musiman**

Pengangguran musiman adalah fenomena yang sangat relevan bagi daerah dengan basis ekonomi primer seperti pertanian atau pariwisata. Pengangguran ini terjadi karena perubahan musim atau periode tertentu dalam setahun yang menyebabkan aktivitas ekonomi berhenti sementara. Samuelson dan Nordhaus (2019) mengemukakan bahwa pengangguran musiman bersifat periodik dan dapat diprediksi, seperti petani yang menganggur di antara masa tanam dan masa panen, atau pekerja hotel di daerah wisata yang mengalami penurunan okupansi pada musim sepi pengunjung (*low season*).

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis data sekunder. Penelitian ini memanfaatkan data resmi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya Berita Resmi Statistik (BRS) terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan indikator ketenagakerjaan lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rentang waktu 2020–2024 serta proyeksi hingga 2026. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal, buku ekonomi ketenagakerjaan, serta laporan kebijakan pemerintah. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif

mengenai dinamika pasar tenaga kerja secara faktual dan kontekstual, tanpa melakukan manipulasi variabel penelitian.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara membandingkan tren TPT NTB dengan rata-rata nasional, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi pasar tenaga kerja, seperti dominasi sektor informal, dampak pandemi COVID-19, dan keberadaan proyek strategis nasional seperti KEK Mandalika. Analisis ini juga mengintegrasikan perspektif teoritis terkait pengangguran struktural, friksional, dan setengah pengangguran untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian. Dengan demikian, metode ini mampu menjelaskan fenomena paradoks antara rendahnya angka pengangguran dan kualitas pekerjaan yang masih rendah, serta memberikan dasar yang kuat bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja di Provinsi NTB, berikut adalah sajian data TPT periode 2020–2024 yang membandingkan kondisi lokal dengan rata-rata nasional.

**Tabel 1. Perbandingan TPT NTB dan Nasional (2020–2024)**

<b>Tahun</b>	<b>TPT Provinsi NTB (%)</b>	<b>TPT Nasional (%)</b>	<b>Selisih (Persentase Poin)</b>
2020	4,22	7,07	-2,85
2021	3,01	6,49	-3,48
2022	2,89	5,86	-2,97
2023	2,80	5,32	-2,52
2024*	2,73	4,82	-2,09

> *Data diolah dari Berita Resmi Statistik (BRS) BPS NTB & BPS RI (Angka estimasi/Agustus).*

**1. ANALISIS DATA PENELITIAN**

Analisis terhadap dinamika pasar tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama lima tahun terakhir menunjukkan pola resiliensi yang cukup unik jika dibandingkan dengan tren ketenagakerjaan nasional. Berdasarkan data yang dihimpun dari Berita Resmi Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB pada tahun 2020 sempat menyentuh angka 4,22% sebagai dampak langsung dari guncangan pandemi COVID-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata. Namun, angka ini secara konsisten mengalami penurunan hingga mencapai kisaran 2,73% pada tahun 2024. Penurunan yang signifikan ini menempatkan NTB sebagai salah satu provinsi dengan angka pengangguran terendah di Indonesia, jauh di bawah rata-rata nasional yang masih berada pada level 4,82% hingga 5%.

Menurut Suryahadi dkk. (2021), daya lentur pasar kerja di wilayah kepulauan sering kali didorong oleh kecepatan sektor informal dalam menyerap kembali tenaga kerja yang ter-PHK dari sektor formal selama masa krisis. Penurunan TPT yang stabil ini mengindikasikan bahwa kapasitas pasar tenaga kerja lokal di NTB memiliki daya serap yang cukup tinggi, meskipun kualitas dari penyerapan tersebut masih memerlukan tinjauan kritis dari perspektif kesejahteraan.

Fenomena rendahnya angka pengangguran di NTB secara teoretis berkaitan erat dengan struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dalam pasar tenaga kerja agraris, masyarakat cenderung memiliki fleksibilitas tinggi untuk masuk ke dalam sektor informal atau menjadi pekerja keluarga yang tidak dibayar demi menghindari status pengangguran terbuka. Sebagaimana dijelaskan oleh Sukirno (2020), pada negara atau wilayah berkembang, pengangguran terbuka sering kali rendah bukan karena kemakmuran, melainkan karena ketiadaan jaring pengaman sosial yang memaksa penduduk untuk bekerja di sektor apa pun demi kelangsungan hidup. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun pertumbuhan ekonomi NTB terkadang mengalami fluktuasi akibat harga komoditas tambang, angka TPT tetap terjaga rendah. Sebagian besar tenaga kerja di NTB terserap dalam unit-unit usaha kecil dan tradisional yang tidak mensyaratkan kualifikasi pendidikan tinggi, sehingga penduduk dengan tingkat pendidikan rendah sekalipun dapat dengan mudah terakomodasi dalam aktivitas ekonomi subsisten.

## 2. PEMBAHASAN

Interpretasi mendalam terhadap data TPT di NTB mengungkap adanya paradoks antara kuantitas lapangan kerja dan kualitas kesejahteraan. Rendahnya tingkat pengangguran di wilayah ini tidak serta-merta mencerminkan kemakmuran ekonomi yang merata, melainkan sering kali menutupi masalah setengah pengangguran (*underemployment*). Banyak tenaga kerja di NTB yang bekerja dengan jam kerja di bawah standar normal (kurang dari 35 jam per minggu) atau bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan kompetensinya demi memenuhi kebutuhan dasar. Mulyadi (2019) menyatakan bahwa dalam kondisi ini, pasar tenaga kerja mengalami inefisiensi di mana produktivitas marginal tenaga kerja sangat rendah. Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan pada sektor pariwisata yang bersifat musiman, di mana pada periode tertentu tenaga kerja terserap secara masif, namun pada musim sepi pengunjung, mereka kembali menjadi pekerja tidak tetap. Struktur pasar tenaga kerja di NTB masih sangat rentan terhadap perubahan musim dan guncangan eksternal global yang memengaruhi mobilitas wisatawan.

Integrasi proyek strategis nasional, seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, telah membawa transformasi signifikan pada komposisi pasar tenaga kerja di Pulau Lombok. Kehadiran investasi besar ini mulai menggeser orientasi tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional menuju sektor jasa, akomodasi, dan konstruksi. Transformasi ini terlihat dari tren penurunan TPT yang lebih cepat di wilayah penyangga kawasan pariwisata dibandingkan wilayah pedalaman. Namun, tantangan baru muncul dalam bentuk ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*) antara kebutuhan industri pariwisata internasional dengan kualifikasi tenaga kerja lokal. Studi oleh Firmansyah dan Utama (2020) menunjukkan bahwa tanpa adanya intervensi pendidikan vokasi yang masif, pertumbuhan sektor jasa hanya akan menciptakan "enklave ekonomi" yang menguntungkan tenaga kerja terampil dari luar daerah, sementara penduduk lokal tetap terjebak dalam pekerjaan lapis bawah dengan upah minimum dan status kontrak yang tidak pasti.

Ketergantungan ekonomi NTB pada sektor pertambangan di Pulau Sumbawa juga memberikan warna tersendiri bagi potret pengangguran daerah. Sektor pertambangan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB, namun kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja secara langsung relatif kecil karena sifat industrinya yang padat modal (*capital intensive*). Kondisi ini menciptakan fenomena pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif. Menurut Todaro dan Smith (2020), ketergantungan pada sektor ekstraktif sering kali gagal menciptakan lapangan kerja yang luas karena keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dengan ekonomi lokal yang masih lemah. Analisis pasar tenaga kerja menunjukkan bahwa lonjakan ekonomi dari sektor tambang sering kali tidak mampu menurunkan angka pengangguran secara drastis di wilayah sekitar tambang karena standar kompetensi tinggi yang ditetapkan oleh perusahaan multinasional melampaui rata-rata kemampuan angkatan kerja lokal yang didominasi lulusan pendidikan menengah.

Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Provinsi NTB perlu merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya terpaku pada upaya menurunkan angka pengangguran secara kuantitatif, tetapi lebih pada peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja secara kualitatif. Diperlukan revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang terintegrasi secara langsung (*link and match*) dengan kebutuhan industri di KEK Mandalika dan proyek strategis lainnya agar putra daerah memiliki daya saing yang setara. Selain itu, kebijakan penguatan sektor UMKM melalui formalisasi usaha dan kemudahan akses pemodal menjadi krusial untuk mengubah wajah sektor informal di NTB menjadi lebih

produktif. Sebagaimana disarankan oleh Arsyad (2018), intervensi pemerintah melalui diversifikasi ekonomi non-tambang dan peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui industrialisasi pedesaan adalah kunci utama agar rendahnya angka pengangguran di NTB diikuti dengan peningkatan pendapatan riil dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memasuki periode 2025-2026, pasar tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat diproyeksikan akan menghadapi fase stabilisasi pasca-transformasi digital yang masif dan penguatan ekonomi hijau di berbagai sektor unggulan. Dalam rentang waktu ini, implementasi penuh dari berbagai proyek strategis nasional dan pengembangan destinasi wisata berkelanjutan diharapkan menjadi katalisator utama yang mampu menjaga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tetap berada di bawah tren nasional. Namun, tantangan pada tahun 2025 dan 2026 akan bergeser pada upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal agar mampu beradaptasi dengan otomasi industri serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung operasional sektor jasa dan perdagangan. Sebagaimana ditekankan dalam peta jalan pembangunan daerah, periode ini merupakan momentum krusial bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan bahwa rendahnya angka pengangguran selaras dengan peningkatan kualitas upah riil dan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja di sektor formal maupun informal.

#### **D. KESIMPULAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2024 mengalami pemulihan yang resilien, ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,22% menjadi 2,73%, yang berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan tingginya kapasitas serap tenaga kerja, terutama dari sektor pertanian dan pariwisata pasca-pandemi. Namun, rendahnya pengangguran tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan karena masih tingginya setengah pengangguran, dominasi sektor informal, serta rendahnya produktivitas dan upah. Ke depan (2025–2026), pasar tenaga kerja NTB menghadapi tantangan struktural berupa ketidaksesuaian keterampilan akibat perkembangan proyek strategis seperti KEK Mandalika dan sektor pertambangan, serta kerentanan terhadap guncangan eksternal, sehingga diperlukan diversifikasi ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Pemerintah Provinsi NTB disarankan untuk segera mengimplementasikan kebijakan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan pendidikan vokasi melalui skema *link and match* yang terintegrasi secara spesifik dengan standar kebutuhan industri pariwisata global dan hilirisasi pertambangan. Selain itu, diperlukan adanya insentif bagi pelaku UMKM untuk melakukan formalisasi usaha guna memberikan jaminan perlindungan sosial dan standar upah yang lebih layak bagi pekerja informal. Terakhir, diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industrialisasi pedesaan berbasis pengolahan produk pertanian lokal harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer mentah, sehingga tercipta nilai tambah yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik di pedesaan dan menekan angka setengah pengangguran secara berkelanjutan.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2018). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. (2024). *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat Agustus 2024*. Mataram: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi Statistik: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: BPS RI.
- Firmansyah, A., & Utama, M. S. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi Terapan*, 5(2), 112-125.
- Firmansyah, F., dkk. (2022). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Struktur Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Regional*, 12(1), 45-60.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2023). *Laporan Tahunan Pasar Kerja Indonesia*. Jakarta: Kemnaker.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics (9th ed.)*. Cengage Learning.
- Mulyadi, S. (2019). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, P. E. (2021). *Ekonomi Regional: Teori dan Analisis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2019). *Economics*. McGraw-Hill Education.

- Sudirman, dkk. (2022). Analisis Dampak Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di NTB. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 7(1), 22-35.
- Sukirno, S. (2020). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R. A., & Suryadarma, D. (2021). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. SMERU Working Paper.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R. A., & Suryadarma, D. (2021). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. SMERU Working Paper.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. Pearson Education.